

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era digital telah mentransformasi pada semua lini kehidupan manusia, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi sampai dengan perdagangan. Dunia telah bergeser dari analog ke arah media teknologi digital yang hadir secara massif. Era revolusi ke-4.0 ini ditandai dengan munculnya komunikasi dengan media digital (internet) yang melahirkan komunitas virtual dan digital. Beberapa *hardware* yang muncul di era ini dimulai dari teknologi komputer dan ponsel.¹ Penyiaran televisi di tanah air juga mengalami perubahan karena berkembangnya teknologi informasi pada era digital.

Transformasi digital adalah pintu masuk terjadinya perubahan. Transformasi digital pada Televisi dapat memanfaatkan internet. Munculnya internet membawa transformasi produksi dan distribusi informasi melalui media massa. Internet banyak digunakan karena aksesnya cepat, biaya murah, dan mudah menggunakannya. Sifat interaktif internet menjadi pembeda utama internet dibandingkan dengan media massa lainnya. Meskipun internet menyediakan layanan informasi yang demikian meluber, namun tingkat kepercayaan publik terhadap internet relatif berkurang dibandingkan dengan media konvensional lain.²

Secara sederhana digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Digitalisasi secara teknis merupakan representasi dari sinyal-sinyal, gambar, suara dan benda-benda

¹ Suciati, dkk., OASE BROADCASTING: Percikan Pemikiran Dinamika Dunia

² Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, Makassar, Alauddin University Press, 2013, hlm.261

dengan menghasilkan serangkaian angka yang dinyatakan sebagai nilai diskret. Transformasi digital merupakan proses perubahan menyeluruh dalam menciptakan nilai dengan berbagai teknologi yang berpusat pada digitalisasi. Transformasi digital merupakan kemampuan baru secara fundamental yang diciptakan dalam bisnis, pemerintahan publik, dan dalam kehidupan masyarakat”. Karena itu, transformasi digital adalah kemampuan baru yang diciptakan secara holistik dan komprehensif yang memungkinkan adanya perubahan budaya, organisasi, hubungan ataupun model administrasi yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat.³

Transformasi digital bermanfaat dalam peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil agar bisa lebih responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adanya keterbukaan maka dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini dapat menghilangkan rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.⁴ Hal ini juga berlaku bagi LPP TVRI sebagai sektor pemerintah dalam penyiaran publik.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa “Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”. Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Dalam UU ini juga disebutkan

³ Sepriano, dkk. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm.40

⁴ Ibid, hlm.44-45

bahwa pemerintah mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Artinya, pemerintah mendukung adanya transformasi digital pada penyiaran televisi.

Digitalisasi merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan inefisiensi pada penyiaran analog, baik radio maupun televisi. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran di antaranya adalah kanal siaran dengan jumlah yang lebih banyak dan infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi yang masing-masing cukup menggunakan satu alat untuk banyak siaran. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil sehingga kualitas penerimaan oleh penonton akan lebih baik.⁵

Saat ini, Indonesia berada di ambang era TV digital. Digitalisasi televisi ini akan semakin menambah kecanggihan layar TV dengan sajian program yang kian beragam. Televisi akan menjadi magnet yang daya tariknya kian bertambah kuat. Polesan teknologi digital buat pertelevisian dunia kian terasa warna dan suaranya. Televisi digital memudahkan, memanjakan penonton di rumah, stasiun televisi, dan *production house*, hingga pemerintah.⁶

⁵ Puji Rianto, dkk. *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012, hlm.67

⁶ Puji Rianto, dkk. *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012, hlm.52

Migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Tahapan serta tenggat waktu pelaksanaan migrasi telah ditetapkan, yakni: (i) tahap I: paling lambat 30 April 2022; (ii) tahap II: paling lambat 25 Agustus 2022; dan (iii) tahap III: paling lambat 2 November 2022. Artinya, mulai 2 November 2022 siaran televisi analog wajib berhenti dan beralih sepenuhnya menjadi siaran secara digital.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dalam Pasal 2 menjelaskan dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Pada Pasal 19 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.⁷

Dalam mendukung layanan penyiaran publik, pemerintah dalam hal ini menyediakan sebuah laman yang dapat diakses oleh masyarakat dalam dua puluh empat jam. Berbagai informasi baik berupa layanan masyarakat maupun laporan pertanggung jawaban terhadap kebijakan yang dilakukan. Segala informasi tersebut dihimpun melalui lembaga pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya adalah dengan siaran TV Nasional.⁸

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

⁸ Suciati, dkk., OASE BROADCASTING: Percikan Pemikiran Dinamika Dunia Broadcasting di Indonesia, Yogyakarta: Buku Litera MJ II, 2022, hlm.25

Kebutuhan perubahan organisasi yang meningkat saat ini mengubah, melalui transformasi digital, cara pemerintah daerah memandang praktik manajemen pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau meningkatkan penyampaian layanan secara efektif. Memahami dan memprediksi perubahan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, eksekutif pemerintah, peneliti, dan semua orang yang menyiapkan, merancang, mengimplementasikan, atau mengevaluasi keputusan pemerintah daerah.⁹

Transformasi digital memiliki peran penting dalam penyampaian informasi publik di era digital saat ini. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁰

Hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintahan terbuka dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).¹¹

⁹ Endang Try Setyasih, "Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Papatung*, Vol.5, No.3, 2022, hlm.60

¹⁰ BPKP, *Layanan Informasi Publik*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018, hlm.5

¹¹ Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1, No.1, 2012, hlm.150

Informasi publik dalam ilmu pemerintahan juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 Ayat (2) dalam UU KIP ini menyebutkan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang”.¹²

Implementasi UU KIP terlihat dari hubungan antara pemerintahan dan warganegaranya. Penerapan KIP melekat pada 2 (dua) pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat (publik). Pada sisi penyelenggara pemerintahan, penerapan UU KIP antara lain menyediakan informasi publik, baik informasi yang sifatnya wajib, berkala, dan serta merta. Implementasi lainnya adalah bahwa segala kebijakan publik, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintahan, penyusunan anggaran (DIPA) termasuk isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.¹³

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran dalam melaksanakan layanan penyiaran publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan transformasi digital. Dalam rangka mengimplementasikan transformasi digital di lingkungan lembaga pemerintahan dibutuhkan beberapa tambahan struktur, infrastruktur dan staf yang secara khusus mengelola dan memberi pelayanan informasi. Namun demikian, struktur yang dibentuk harus sederhana, efisien dan ramping. Sehingga permintaan informasi tidak melalui jenjang birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹³ Nunuk Febriananingsih, Op.Cit, hlm.154

Televisi Republik Indonesia adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. LPP TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama Radio Republik Indonesia, yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.32/2002 tentang Penyiaran. Kehadiran LPP TVRI dibentuk sebagai pembangunan infrastruktur yang disiapkan oleh Pemerintah sebagai lembaga penyiaran Sejak Tahun 2005 hingga kini, Status LPP TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Sebagai televisi publik, LPP TVRI mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyatakan bahwa LPP TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. LPP TVRI juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tempat kedudukan LPP TVRI di ibukota Negara Republik Indonesia ini adalah sebagai stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah.¹⁴

LPP TVRI Jambi adalah stasiun televisi daerah milik Televisi Republik Indonesia yang melayani wilayah Jambi. Stasiun ini didirikan pada tanggal 15 April 1995 di Kota Jambi, dan saat ini berkantor di Jalan Jambi Muara, Kota

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Jambi. LPP TVRI Jambi sebagai media elektronik turut serta dalam meliput berbagai liputan politik. LPP TVRI Jambi memiliki 6 (enam) satuan transmisi yang digunakan untuk melayani siaran di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Adapun cakupan siaran LPP TVRI Jambi yang paling tinggi berada di Kota Jambi (100 persen), Kota Sungai Penuh (97,83 persen), dan Kabupaten Muaro Jambi (91, persen), sedangkan cakupan berdasarkan populasi yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (17,85 persen), Kabupaten Tebo (50,84 persen), dan Kabupaten Kerinci (51,46 persen). Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya cakupan siaran pada Provinsi Jambi.

Pada era digital ini, LPP TVRI Jambi dapat melakukan transformasi digital dalam meningkatkan layanan penyiaran publik, di samping telah banyak lembaga penyiaran televisi swasta lainnya yang telah banyak melakukan transformasi digital. Transformasi digital yang dilakukan LPP TVRI dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur siaran langsung media sosial sebagai wujud nyata dari konvergensi media LPP TVRI.¹⁵

Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan kepada masyarakat Provinsi Jambi diperoleh hasil survey sebagai berikut:

¹⁵ Sitti Wahyuni Artini, Muhammad Farid & Jeanny Maria Fatimah, "Transformasi Digital LPP TVRI Sulawesi Selatan Manfaatkan Fitur Siaran Langsung Platform Media Sosial", *Jurnal Communicology*, Vol.10, No.1, 2022, hlm.101

Tabel 1.1 Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Terhadap Siaran TVRI Jambi

No.	Survei	Jawaban paling Tinggi	Skor
1.	Domisili Responden	Kota Jambi	63,9%
2.	Usia Responden	41-50 Tahun	37,5%
3.	Pendidikan Responden	Sarjana (S1)	43,1%
4.	Acara LPP TVRI Jambi yang paling banyak digemari	Jambi Hari ini	61,1%
5.	Kepuasan terhadap program acara yang ditayangkan LPP TVRI Jambi	Tidak Puas	52%
6.	Media untuk menonton siaran LPP TVRI Jambi	TV Digital	36,2%
7.	Kepuasan terhadap kualitas siaran LPP TVRI Jambi	Tidak Puas	64,2%

Sumber: Survei LPP TVRI Jsmbi, 2024

Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan diperoleh bahwa responden paling banyak adalah masyarakat Kota Jambi, berumur 41-50 tahun, berpendidikan Sarjana (S1). Sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi gemar menonton pada TV Digital dengan program andalan “Jambi Hari Ini”. Namun, masih terdapat masyarakat yang kurang puas dengan program acara yang ditayangkan LPP TVRI Jambi dan kualitas siaran LPP TVRI Jambi yang masih kurang dibandingkan dengan siaran TV lainnya. Hal ini menunjukkan, LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional agar dapat melakukan transformasi digital untuk meningkatkan layanan penyiaran publik.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara salah satu pegawai LPP TVRI Jambi, diperoleh bahwa masih terjadi permasalahan terkait alasan, objek, proses dan hasil transformasi digital yang telah dilakukan oleh LPP TVRI Jambi. Alasan transformasi digital yang dilakukan adalah untuk melakukan perubahan agar dapat penyiaran terbaik bagi masyarakat, namun saat ini telah banyak pesaing penyiaran publik lainnya seperti lembaga penyiaran televisi swasta.

Objek transformasi digital adalah LPP TVRI Jambi telah membuat berbagai program, yaitu Jendela Negeri, Jambi Hari Ini, Bekabar Jambi, Ruang Publik, Inspirasi Indo, Desaku, dan Rumah Demokrasi. Namun, saat ini belum ada penambahan program baru dikarenakan masih kurangnya fasilitas dalam mengembangkan program. Untuk mendukung penyiaran informasi, LPP TVRI Jambi membutuhkan tambahan studio dan Mobil OB Vandengan standar *broadcasting*. Serta diperlukan adanya penambahan alat *Cellular Bonding* untuk melakukan siaran langsung lebih dari satu lokasi. Dari sisi SDM, diperlukan adanya penambahan SDM berstatus ASN dan upaya LPP TVRI Jambi dalam menyiarkan dan melakukan layanan penyiaran publik sehingga dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak muda.

Proses transformasi digital yang dilakukan adalah LPP TVRI Jambi adalah mulai melakukan siaran langsung pada *platform* media sosial. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh LPP TVRI Jambi melaksanakan proses transformasi digital tersebut. LPP TVRI Jambi hanya melakukan siaran langsung pada *platform* Instagram saja, belum dilakukan pada *platform* lainnya dimana pada dasarnya telah banyak *platform* media sosial saat ini untuk dapat menjangkau penonton semakin luas.

Hasil transformasi digital di LPP TVRI Jambi berdasarkan observasi awal adalah siaran langsung yang telah dilakukan *platform* Instagram belum dapat menjangkau jumlah tayangan yang tinggi. Dengan demikian, transformasi digital lebih lanjut agar LPP TVRI Jambi dapat meningkatkan layanan penyiaran publik di wilayah Jambi.

Transformasi digital menjadi penting bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Di era digital, masyarakat semakin terbiasa dengan akses konten secara on-demand melalui berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet, yang memungkinkan mereka menikmati siaran kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi juga membantu meningkatkan kualitas layanan, baik dari segi produksi maupun penyajian konten, sehingga TVRI dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pemirsa. Selain itu, transformasi digital memperkuat daya saing TVRI dalam menghadapi persaingan dari media digital lainnya, seperti platform streaming dan kanal berita online, yang semakin mendominasi pilihan konsumsi konten masyarakat.

Selain mendukung daya saing, transformasi digital juga memungkinkan TVRI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publiknya. Dengan teknologi digital, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan TVRI dan memberikan masukan secara real-time melalui berbagai platform digital. Transformasi ini membuka peluang untuk inovasi konten yang lebih variatif, seperti siaran langsung melalui media sosial, infografis interaktif, dan kolaborasi dengan kreator konten, yang membuat penyiaran lebih menarik dan relevan. Semua ini menjadikan transformasi digital sebagai kebutuhan mendasar bagi TVRI untuk tetap relevan dan mampu memenuhi harapan pemirsa di era informasi digital..

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait transformasi digital yang dilakukan oleh LPP TVRI Jambi dalam

meningkatkan layanan penyiaran publik di wilayah Jambi. Sehingga penelitian ini berjudul “Transformasi Digital LPP TVRI Dalam Meningkatkan Layanan Penyiaran Publik (Studi Kasus pada LPP TVRI Jambi)”

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Transformasi Digital LPP TVRI Sulawesi Selatan Manfaatkan Fitur Siaran Langsung Platform Media Sosial (Artini, 2022)	Penelitian ini melibatkan 4 orang informan yang merupakan pimpinan dan pegawai LPP TVRI Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian menemukan bahwa LPP TVRI Sulawesi Selatan memanfaatkan fitur siaran langsung di 3 platform media sosial, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat jangkauan distribusi berita yang diproduksi oleh LPP TVRI Sulawesi Selatan. Terbukti dengan adanya fitur live broadcast platform media sosial dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara real time selama terhubung dengan internet. ¹⁶
2.	Strategi Transformasi Digital LPP TVRI (Teruri, 2022)	Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian literatur dan observasi. Metode penyusunan strategi yang digunakan adalah metode dari Sunil Gupta yaitu <i>reimagine your business, reevaluate your value chain, reconnect with your</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menyusun strategi dalam menerapkan transformasi digital antara lain dengan melakukan pengembangan strategi digital dengan menggunakan kerangka yang dimiliki oleh Sunil Gupta. Setelah itu, dapat disimpulkan bahwa strategi digital yang dikembangkan berfokus pada membangun kapabilitas baru yaitu untuk menjadikan LPP TVRI sebagai Digital Broadcaster. Dengan menerapkan model Freemium untuk konten tertentu. ¹⁷

¹⁶ Sitti Wahyuni Artini, Muhammad Farid & Jeanny Maria Fatimah, “Transformasi Digital LPP TVRI Sulawesi Selatan Manfaatkan Fitur Siaran Langsung Platform Media Sosial”, *Jurnal Communicology*, Vol.10, No.1, 2022, hlm.91-103

¹⁷ Shabrina Teruri, Herry Azhari Rangkuti, Riri Satria, Sofian Lusa, “Strategi Transformasi Digital LPP TVRI”, *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, Vol.1, No.4, 2022, hlm.283-298

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>customers, dan rebuild your organization</i>	
3.	Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia (Agussetianingsih, 2021)	Penelitian melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat elemen desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan.	Kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi. ¹⁸
4	Transformasi Pelayanan Publik Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi	Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Seluruh data didapatkan menggunakan analisis pada berbagai literatur terkait.	Hasil penelitian bahwa jika ingin mewujudkan sistem e-government secara maksimal di Kota Jambi maka diperlukan bersinergi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berbagai data antar OPD satu ke OPD yang lain yang berada di Pemerintahan Kota Jambi. Sehingga transformasi pemerintah digital ini sangat dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan jika pemerintah ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat, maka dengan meningkatkan transparansi pemerintah, aksesibilitas,

¹⁸ Budi Agussetianingsih & Azhar Kasim, "Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia", *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.7, No.2, 2021, hlm.167-186

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			komunikasi, dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ¹⁹

Secara umum dari empat penelitian sebelumnya tentang transformasi digital yang dilakukan oleh LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, sedangkan peneliti lainnya berpendapat bahwa transformasi digital yang dilakukan LPP TVRI, terutama LPP TVRI Jambi, belum tentu telah dilakukan secara optimal. Di sisi lain, penelitian lain juga meneliti tentang transformasi digital, namun berfokus pada transformasi digital pada pelayanan publik untuk mewujudkan e-government. Perbedaan kajian tersebut akan mengarah pada transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik di wilayah Jambi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada studi yang dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfokus pada transformasi digital pada Ilmu Ekonomi dan Komunikasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada transformasi digital dalam ilmu pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi pada sektor perekonomian, namun juga dilakukan pada sektor pemerintahan. Transformasi digital pelayanan publik diarahkan guna merevolusi desain pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (*publik trust*) terhadap pemerintah, serta meningkatkan performa kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

¹⁹ Hendriyadi, Erida, & Ovie Yanti, "Transformasi Pelayanan Publik Digital di Masa Pandemi Covid 19 untuk Mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, vol. 17. No. 3, 2022, hlm. 669-682.

Transformasi digital ini melibatkan pengenalan inisiatif yang diperlukan untuk membuat perubahan lebih dalam dalam penyediaan layanan *online* melalui portal *e-government*, dan dalam penyusunan kebijakan pemerintah secara lebih luas. Penelitian ini menggunakan teori transformasi digital dalam administrasi publik oleh Mergel, yaitu alasan, objek, proses, dan hasil transformasi digital. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat umum dalam meningkatkan layanan penyiaran publik melalui LPP TVRI.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong atau menghambat transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menghambat transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang transformasi digital dalam meningkatkan layanan pada sektor pemerintah. Teori transformasi digital dalam hal ini melibatkan pengenalan inisiatif yang diperlukan untuk membuat perubahan lebih dalam dalam penyediaan layanan pelayanan publik melalui portal *e-government* dan penyusunan kebijakan pemerintah secara lebih luas. Dengan demikian, berbagai pihak dapat memanfaatkan teori yang digunakan terkait transformasi digital pada ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi LPP TVRI Jambi dalam memanfaatkan perkembangan televisi saat ini. LPP TVRI dapat meningkatkan layanan penyiaran publik sehingga dapat menjangkau masyarakat secara merata untuk kedaulatan Negara khususnya di wilayah Jambi dengan melakukan transformasi digital.

1.5 Landasan Teori

Konsep dari pemerintahan adalah sebuah ilmu dan juga seni. Disebut sebagai sebuah seni karena ada banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, tetapi mampu berkiat serta dengan kharismaniknya menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur

yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian perintah adalah perkataan yang dimaksudkan untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah. Pemerintah adalah perbuatan (cara, urusan dan sebagainya) memerintah.²⁰

Secara umum, kajian pemerintahan dalam perspektif keilmuan masih terbatas jika dilihat perkembangannya. Hal ini disebabkan posisi ilmu pemerintahan yang bersifat transisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Disebut transisional karena ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayang-bayang ilmu tersebut. Secara klasikal, pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktik pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang terbagi melalui cabang-cabang kekuasaan.²¹

Ilmu pemerintahan Menurut Syafie adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Menurut Poelje ilmu pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.²²

Ilmu pemerintahan berkaitan dengan transformasi digital dan layanan publik yang terletak pada peran pemerintah dalam mengelola lembaga penyiaran

²⁰ Hendrayady, Agus, et al. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara, 2022, hlm. 1

²¹ Labolo, Muhadam. *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023, hlm. 1

²² Haudi, S. Pd, et al. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm 2

publik dan kebijakan digitalisasi yang diadopsi oleh lembaga-lembaga negara. TVRI sebagai media publik berperan dalam mendukung fungsi pemerintah untuk menyebarkan informasi, pendidikan, dan promosi kebijakan. Hal tersebut relevan dengan bagaimana pemerintahan memanfaatkan media untuk komunikasi kebijakan kepada warga negara, khususnya dalam era digital.²³

Transformasi digital memiliki hubungan dengan pemerintah dimana pemerintah saat ini mulai menggunakan teknologi informasi dengan harapan menjadikan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparansi bagi masyarakat. Melalui transformasi digital, pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik, adanya peningkatan efektivitas dalam organisasi pemerintahan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di lingkungan pemerintahan. Hal ini juga berlaku pada LPP TVRI sebagai salah satu bagian dari pemerintahan yang dituntut untuk melakukan transformasi digital.²⁴

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mergel mengenai indikator transformasi digital dalam administrasi publik, yaitu alasan, objek, proses, dan hasil transformasi digital. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait transformasi digital.²⁵

1.5.1 Transformasi Digital

Pada era digital saat ini Administrasi Publik mengalami perubahan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh

²³ Katharina, Riris. *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021. hlm. 14

²⁴ Sulistiyo, Heru, et al. "Government Performance Pada Kebijakan Transformasi Digital: Bagaimana Transformation Capability Mempengaruhinya? (Studi Empiris Di Provinsi Maluku Utara)." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2023, hal. 98.

²⁵ Ines Mergel, Noella Edelman, Nathalie Haug. "Defining digital transformation: Results from expert interviews". *Government Information Quarterly*, 36(4), 2019, hlm.7

teknologi informasi dan komunikasi. Era digital membawa perubahan fundamental dalam cara-cara tradisional administrasi publik dilakukan. Transformasi digital mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek administrasi publik, mulai dari pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik yang lebih efisien.²⁶

Transformasi Digital adalah proses yang terdiri dari beberapa fase, yang memimpin perusahaan terhadap kemampuan memenuhi tuntutan dunia digital dengan keunggulan. Ini proses, agar lebih dipahami, harus dianggap sebagai proses “kedewasaan”. Ada banyak model yang dikembangkan untuk mengukur kematangan, keselarasan strategis, perbaikan berkelanjutan, ketangkasan dan fleksibilitas organisasi, arsitektur perusahaan dan manajemen pengetahuan, dan pengembangan bisnis. Model-model ini adalah bersifat preskriptif dan dirancang untuk menilai kompetensi, kapasitas, dan tingkat kinerja domain yang dipilih berdasarkan serangkaian kriteria yang kurang lebih luas, yaitu, untuk menilai kematangan proses dalam organisasi.²⁷

Transformasi digital (DT) merupakan hasil digitalisasi dan digitalisasi perekonomian dan masyarakat. DT adalah proses yang berkelanjutan. Pengenalan digital teknologi menciptakan peluang dan tantangan baru. Pertimbangan tantangan yang ditimbulkan oleh suatu proses transformasi digital, yaitu sebuah fenomena kompleks dari perkembangan yang berbeda. Salah satu isu utama dalam implementasi transformasi digital adalah perubahan cara berpikir dan persyaratan kompetensi pekerja di industri. Pertama, terkait dengan pemahaman masyarakat

²⁶ Sepriano, *Op.Cit.*, hlm.1

²⁷ Cengiz Kahraman & Elif Haktanır (Ed). *Intelligent Systems in Digital Transformation: Theory and Applications*. Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm.34

terhadap transformasi digital proses dan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi digital secara efektif.²⁸

Transformasi Digital adalah proses transisi di mana perusahaan dan merek dalam lingkungan kompetitif mengalami peningkatan dengan menggunakan teknologi digital dan sosial dalam struktur organisasi mereka. Transformasi Digital memberikan pengayaan kepada pelanggan dan lingkungan hidup, membantu mengembangkan dan menyusun proses bisnis dan model bisnis, serta meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perusahaan atau lembaga.²⁹

Transformasi digital adalah transformasi holistik manusia, proses bisnis, dan elemen teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien serta menjamin kepuasan penerima manfaat, sejalan dengan peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan perubahan kebutuhan sosial. Meskipun awal mula transformasi digital dikaitkan dengan kemunculan internet, namun diketahui bahwa hal tersebut sudah ada sejak zaman dulu. Banyak ilmuwan mempunyai ide dan penelitian mengenai teknologi baru dan dunia digital.³⁰

1.5.2 Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik

Implementasi digitalisasi pelayanan publik lebih dioptimalisasikan sejak adanya era revolusi industri 4.0, dimana seluruh tatanan pemerintahan maupun swasta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik diarahkan guna merevolusi desain pelayanan publik lama, dengan sistem manual, untuk dapat beralih ke sistem baru yang digital. Digitalisasi pelayanan publik

²⁸ Ibid, hlm.35

²⁹ Ibid, hlm.153

³⁰ Ibid, hlm.635

merupakan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan publik, sehingga menjadikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerapan digitalisasi administrasi publik memberi kesempatan bagi pemerintah untuk berinovasi dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (*publik trust*) terhadap pemerintah, serta meningkatkan performa kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.³¹

Transformasi digital melibatkan pengenalan inisiatif yang diperlukan untuk membuat perubahan lebih dalam dalam penyediaan layanan *online* melalui portal *e-government*, dan ke dalam bisnis pemerintah secara lebih luas. Sistem berbasis teknologi yang baru, yang '*transformed*', tidak hanya harus ramah pengguna, berbasis strategi, dan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mereka yang berinteraksi dengan pemerintah, tetapi yang lebih penting seharusnya juga meningkatkan cara sistem pemerintah beroperasi.³²

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat melibatkan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan bersama-sama mengatasi tantangan sosial. Penting untuk dicatat bahwa evolusi Pemerintahan Digital tidak hanya mengacu pada adopsi teknologi, tetapi juga pada perubahan mendasar dalam struktur dan operasi pemerintah. Dengan memahami evolusi ini, pemerintah dapat lebih baik

³¹ Sepriano, *Op.Cit.*, hlm.40

³² Rio Yusri Maulana. *SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN: Teori dan Perkembangan Konseptual Pemerintahan Digital*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2019, hlm.124

mengintegrasikan teknologi digital sebagai bagian integral dari strategi modernisasi mereka.³³

Meskipun pemerintah terus-menerus sibuk dengan berupaya untuk beralih ke dunia *online*, telah ada munculnya organisasi-organisasi yang benar-benar telah melakukan transformasi digital. Teknologi modern biasanya menjadi pendorong terjadinya perubahan, namun menjadi digital pada prinsipnya bukan hanya soal teknologi: perilaku, tindakan, dan budaya mereka juga harus beradaptasi dengan dunia digital. Jadi, misalnya, organisasi digital yang sukses biasanya memiliki model operasi yang dikelompokkan berdasarkan kecepatan dan kemampuan beradaptasi. Budaya yang memungkinkan organisasi untuk bekerja dengan baik dengan cara ini sering kali sangat kontras dengan praktik terbaik yang ada. Jadi transformasi digital sebenarnya memerlukan perancangan ulang dan rekayasa ulang organisasi di setiap tingkatan yang mencakup sumber daya manusia, proses, teknologi, dan tata kelola.³⁴

Pelayanan publik dikelola oleh berbagai organisasi dengan tata kelola, akuntabilitas terhadap struktur atau kualitas demokrasi yang berbeda-beda. Karena ambisi transformasi digital adalah perbaikan di sektor publik, penting untuk menemukan cara merancang dan memberikan layanan berkualitas tinggi dalam skala besar dan cepat dibandingkan dengan pendekatan yang lambat, mahal, dan tidak efisien. Oleh karena itu, OECD mendorong negara-negara untuk

³³ Ibid, hlm.115

³⁴ Alan Brown, Jerry Fishenden & Mark Thompson. *Understanding and Implementing New Digital Business Models*. England: Palgrave Macmillan, 2014, hlm.4

mengeksplorasi manfaat pendekatan pemerintah sebagai *platform* dan dimensi dasar penting dari pemerintahan digital yang matang.³⁵

Inti dari transformasi digital adalah membangun pendekatan kebijakan publik yang koheren dan komprehensif yang menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif dari revolusi digital. Untuk melakukan hal ini, OECD pertama-tama mengkaji bagaimana transformasi digital mempengaruhi pembuatan kebijakan di berbagai bidang kebijakan. Proyek ini mengakui bahwa menanggapi transformasi digital memerlukan pemikiran ulang yang mendasar terhadap kebijakan publik di berbagai bidang.³⁶

Tata kelola digital adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital suatu organisasi, seperti menggunakan situs web, situs seluler, saluran sosial, serta produk dan layanan Internet dan Web lainnya. Memiliki kerangka tata kelola digital yang dirancang dengan baik meminimalkan jumlah perdebatan taktis mengenai sifat dan pengelolaan kehadiran digital suatu organisasi.³⁷

Transformasi digital adalah salah satu dari sedikit permasalahan yang terdapat dalam konsensus bipartisan di pemerintah federal, dan kerja jarak jauh adalah bagian penting dari transformasi ini. Pemerintah federal tidak boleh ragu dalam memperluas pekerjaan jarak jauh dan hibrida ketika mereka memasukkan

³⁵ Jay Liebowitz. *Pivoting Government through Digital Transformation*. Oxon: CRC Press (Taylor & Francis Group), 2024, hlm.14

³⁶ Miriam Lips. *Digital Government: Managing Publik Sector Reform in the Digital Era*. New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2020, hlm.10

³⁷ Lisa Welchman. *Managing Chaos: Digital Governance by Design*. New York: Rosenfeld Media, 2015, hlm.11

prinsip-prinsip kerja jarak jauh ke dalam inisiatif modernisasi IT yang besar dan berkelanjutan.³⁸

Kerangka kerja tata kelola digital mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan digital mengenai produk dan layanan digital tertentu dari inti organisasi ke aspek lain dalam organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk secara efektif mendesentralisasikan pemeliharaan produksi dari kehadiran digitalnya. Terdapat aspek dalam digital pemerintahan adalah tiga topik, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Digital

Strategi digital mengartikulasikan pendekatan organisasi dalam memanfaatkan kemampuan Internet dan World Wide Web.

b. Kebijakan Digital

Kebijakan digital adalah pernyataan panduan yang diterapkan untuk mengelola risiko organisasi yang melekat dalam pengoperasian *online*. Pemerintah harus mendapat informasi dari pakar digital, organisasi, dan hukum.

c. Standar Digital

Standar digital adalah pernyataan panduan untuk mengembangkan kehadiran digital organisasi. Mereka harus diinformasikan dan didefinisikan oleh para ahli di bidangnya.³⁹

Pemerintah pun tidak akan luput dari perubahan eksponensial yang dilihat di berbagai aspek kehidupan modern. Saat seseorang beralih ke perekonomian berkelimpahan, sangat penting bagi pemerintah di seluruh dunia untuk

³⁸ Ibid, hlm.183

³⁹ Lisa Welchman. *Op Cit.*, hlm.11-18

memperhatikan cara-cara mereka mengenali wilayah-wilayah yang berkelimpahan. Gelombang berikutnya dalam menjadikan pemerintahan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih baik adalah dengan mengikuti tren ini dan memahami bagaimana mengembangkannya. Baik sektor real estate yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan, bagian dari angkatan kerja yang mungkin mengalami siklus tambahan karena otomatisasi atau digitalisasi, atau banyaknya data yang mereka kumpulkan, pemerintah jelas siap untuk mendapatkan keuntungan dengan memposisikan diri sebagai “organisasi eksponensial”.⁴⁰

Namun, seperti halnya istilah baru-baru ini yaitu “transformasi digital”, hambatan sebenarnya terhadap perubahan ini bukanlah peraturan atau regulasi. Hal ini juga bukan disebabkan oleh kurangnya keinginan sektor publik atau bahkan hasil kebijakan tertentu. Budaya yang sudah mendarah daging dan tertanam sering kali melingkupi pemberian informasi dan layanan, yang memungkinkan pegawai negeri yang bermaksud baik untuk terus melakukan hal-hal seperti yang selalu mereka lakukan.⁴¹

Manajemen perubahan itu sulit, seperti kapal berukuran Titanic berputar dengan lambat. Jika ingin menjadikan pemerintahan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih baik, pemerintah harus menciptakan budaya di mana para pemimpin memahami peran mereka tidak hanya dalam mengelola program dan proyek tertentu tetapi juga dalam mencontohkan jenis perilaku yang membantu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. organisasi yang efisien di era kelimpahan ini. Para pemimpin pemerintahan harus menjadi pemimpin digital, yakni orang-orang yang memahami bahwa hal ini tidak hanya penting untuk

⁴⁰ Alex Benay. *Government Digital: The Quest to Regain Publik Trust*. Canada: Dundurn Toromto, 2018, hlm.96

⁴¹ Ibid

menentukan hasil yang berbeda-beda, namun juga membuat perubahan pada struktur, praktik, nilai, dan perilaku organisasi.⁴²

1.5.3 Landasan Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik

Untuk mencapai layanan digital yang efisien, pemerintah harus mengubah kebiasaan dan proses yang ada dengan mereformasi kebijakan, menyederhanakan prosedur, dan menyusun ulang undang-undang. Melanggar warisan teknologi hanyalah satu hal, dan dalam pandangan kami, ini adalah aspek yang lebih kecil dari perubahan yang diperlukan untuk menjadikan pemerintahan digital. Landasan sukses menjadi pemerintah digital adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan dan Keinginan Berpolitik

Menuju pemerintahan digital, pilar pertama atau persyaratan yang harus ada agar sukses dalam digitalisasi adalah kepemimpinan yang kuat, baik di tingkat politik maupun administratif dalam pemerintahan. Teknologi hanyalah sebuah instrumen yang memungkinkan terjadinya perubahan dengan cara yang spesifik dan efektif, namun perubahan itu sendiri harus dikelola. Istilah populernya adalah “transformasi digital” karena suatu alasan. Teknologi membantu menyederhanakan dan melakukan reformasi, namun teknologi saja tidak cukup. Pemerintah dapat membuat deklarasi pajak atau pendaftaran perusahaan dengan cepat dan mengotomatiskan atau mendigitalkan proses birokrasi yang rumit seperti sebelumnya.⁴³

⁴² Ibid

⁴³ Ibid, hlm.161

b. *Platform* Layanan Bersama Khususnya untuk Identitas Digital dan Berbagi Data

Hal ini juga kuat untuk membangun pemerintahan digital yang efektif dengan menerapkan arsitektur teknis dan infrastruktur yang tepat, yaitu *platform* layanan digital yang digunakan dan dibagikan ke seluruh pemerintahan. Pemerintah harus mengoptimalkan cara melakukan sesuatu, jadi pemerintah mendapatkan ide untuk merakit *platform* bersama untuk fungsionalitas berulang dari proyek TI potensial. Pada dasarnya, pemerintah menciptakan solusi bersama dan infrastruktur layanan umum, karena pemerintah tidak mampu membangun semuanya secara terpisah dan duplikat. Sebagai bonus tambahan, transformasi digital untuk berbagai proses atau layanan juga menjadi lebih cepat. Setelah itu, kebutuhan untuk merekonstruksi fungsi-fungsi yang sama menjadi berkurang, dan upaya yang lebih besar dapat dikerahkan untuk merancang ulang dan mendigitalkan proses bisnis pemerintah yang sebenarnya. Hal ini berarti kami menghindari duplikasi upaya dan sumber daya kami dari satu lembaga ke lembaga lain untuk memahami teknologi yang mendasarinya.⁴⁴

c. Memungkinkan Kerangka Hukum

Beberapa infrastruktur terpenting di suatu negara bukanlah infrastruktur teknis melainkan legal. Peraturan dan regulasi yang sesuai merupakan prasyarat ketiga untuk mewujudkan transformasi digital. Setidaknya, undang-undang tidak bisa menjadi penghalang bagi transformasi digital. Seringkali, inovasi digital terhambat oleh anggapan bahwa “undang-undang tidak

⁴⁴ Ibid, hlm.162

mengizinkan hal tersebut.” Namun undang-undang dapat diubah dan, kenyataannya harus diubah untuk memanfaatkan sarana digital sebaik-baiknya. Harus ada kemauan dan upaya untuk menulis ulang peraturan yang ada jika sudah tidak masuk akal lagi di dunia digital. Contoh paling sederhana adalah menghilangkan persyaratan eksplisit bahwa beberapa proses dan dokumentasi harus berbasis kertas. Desain ulang layanan digital yang sukses selalu memerlukan desain ulang aturan-aturan yang mendasarinya, karena di situlah proses layanan birokrasi diabadikan.⁴⁵

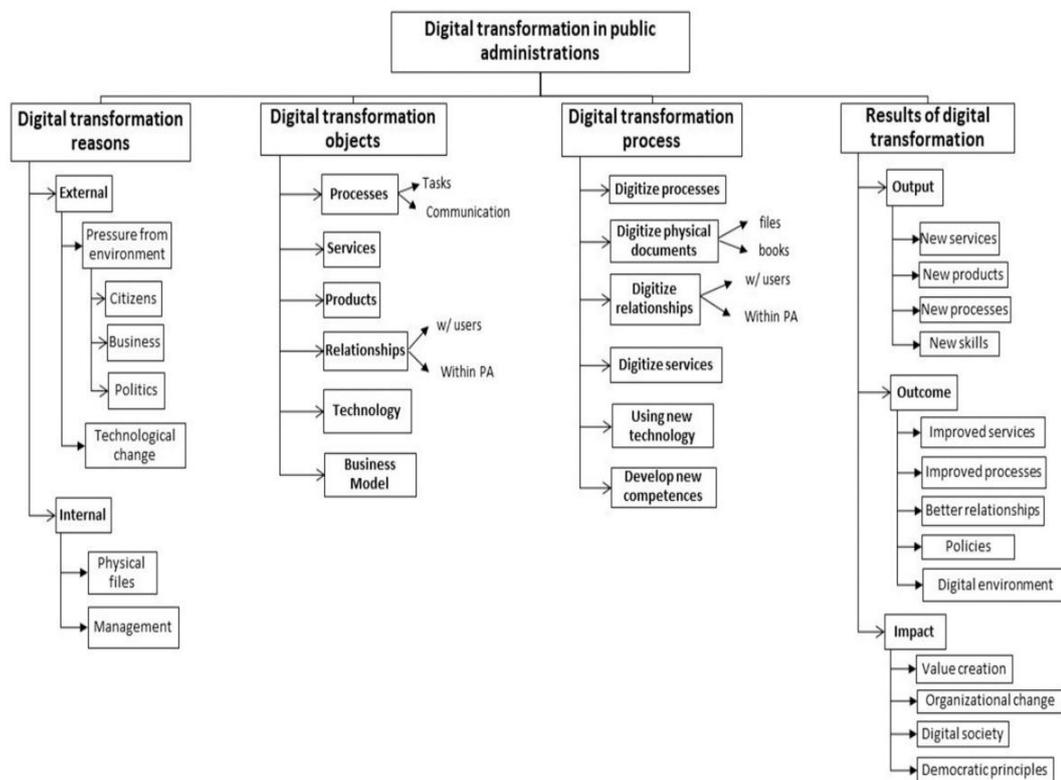
1.5.4 Indikator Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik

Berbagai teori pendekatan yang ada mengenai transformasi digital terutama berfokus pada konsep-konsep seperti *e-Government*, pemerintahan digital, dan pemerintahan transformatif, dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang tidak pasti. Namun demikian, semua konsep ini berkaitan dengan bagaimana sektor publik menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemberian layanan publik, mengubah proses dan budaya organisasi, dan menciptakan nilai berbagai pelayanan publik. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori pendekatan Pemerintahan Era Digital oleh Mergel dkk. Indikator transformasi digital dalam administrasi publik menurut teori Mergel adalah berikut:⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hlm.166

⁴⁶ Ines Mergel, Noella Edelman, Nathalie Haug. “Defining digital transformation: Results from expert interviews”. *Government Information Quarterly*, 36(4), 2019, hlm.7

Gambar 1. Indikator Transformasi Digital



Sumber: Mergel dkk (2019)

Penjelasan indikator transformasi digital dalam administrasi publik

menurut teori Mergel tersebut adalah berikut:

a. Alasan Transformasi Digital

Alasan terjadinya transformasi dan alasan harus melakukan perubahan dapat dipahami sebagai faktor luar (eksternal), atau berasal dari dalam organisasi (internal).

b. Objek Transformasi Digital

Administrator publik menyoroti berbagai objek transformasi digital, termasuk penggunaan teknologi oleh organisasi, model bisnisnya, proses internal, alur kerja atau prosedur, layanan publik yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan, atau produk yang dibuat, termasuk produksi dan penyebaran konten.

c. Proses Transformasi Digital

Proses transformasi digital menggambarkan bagaimana administrator publik melakukan pendekatan terhadap transformasi objek. Proses-proses ini mencakup, misalnya digitalisasi proses, formulir/dokumen, dan layanan yang ada, serta hubungan dengan pemangku kepentingannya. Hal ini mencakup misalnya penggunaan data besar, pendekatan berbasis data, dan berpusat pada pengguna. Terkait pelayanan publik, pakar administrasi publik menyatakan bahwa upaya digitalisasi menawarkan peluang untuk memikirkan kembali proses, layanan, dan produk yang pernah mereka ciptakan untuk dunia offline.

d. Hasil Transformasi Digital

Serangkaian hasil yang dapat dicapai melalui transformasi digital. Hal ini dibagi menjadi keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impacts*). Hal ini dipandang sebagai efek jangka panjang dari transformasi digital terhadap organisasi atau ekosistemnya secara keseluruhan.⁴⁷

1.5.5 Dampak Transformasi Digital Dalam Sektor Publik

Transformasi digital secara luas dianggap sebagai pendorong perubahan dalam semua konteks, terutama dalam konteks bisnis dan pemerintahan, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Teknologi digital telah mengubah sektor publik dengan memengaruhi aplikasi, proses, budaya, struktur, dan tanggung jawab serta tugas aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan layanan yang berkualitas pada masyarakat. Karena itu, adopsi dan implementasi layanan berbasis digitalisasi

⁴⁷ Ines Mergel, Noella Edelman, Nathalie Haug. "Defining digital transformation: Results from expert interviews". *Government Information Quarterly*, 36(4), 2019, hlm.7

mutlak diperlukan pada semua lini organisasi sektor publik. Penggunaan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik juga akan membantu para pemimpin sektor pemerintahan (*publik sectors*) dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah, dan penyediaan pelayanan pada masyarakat yang lebih cepat, efektif, efisien, berkualitas, dan berkeadilan.⁴⁸

Memperkenalkan layanan digital (e-Government) ke dalam tata kelola sektor publik membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat. Digitalisasi memfasilitasi dan mempercepat pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan. Digitalisasi pelayanan publik mempunyai beberapa manfaat, yakni:

- a. Terciptanya pemerintahan yang lebih baik karena proses pelayanan yang lebih transparan, terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat, dan pengawasan yang lebih tepat waktu.
- b. Berkurangnya praktik-praktik korupsi, karena komputer tidak memiliki sifat bawaan yang mengarah pada perilaku korup, segala sesuatu yang terjadi pada sistem komputer hanya bila memang secara sengaja dan sistematis dirancang untuk melakukannya.
- c. Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pelayanan pemerintahan yang lebih baik, baik hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (*government to citizens*), pemerintah dengan dunia usaha (*government to business*), ataupun hubungan antar lembaga pemerintahan (*government to government*).

⁴⁸ Sepriano, dkk. *Op.Cit.*, hlm.38

- d. Peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, untuk menghindari pemborosan belanja sektor publik atau inefisiensi dalam berbagai proses.
- e. Terciptanya efisiensi dalam skala ruang dan waktu.
- f. Struktur dan organisasi informasi yang tersistematisasi; dan
- g. Peningkatan manajemen sumber daya baik dari sisi peningkatan bidang kendali maupun sumber daya organisasinya sendiri.⁴⁹

1.5.6 Manfaat Transformasi Digital Dalam Sektor Publik

Selanjutnya, pentingnya transformasi digital dalam bentuk *egovernment*, dapat memberikan manfaat bagi pelayanan publik, yakni:

- a. Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara sengaja datang ke kantor pemerintah selama terdapat jaringan internet.
- b. Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Adanya keterbukaan agar dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini dapat menghilangkan rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh. Contohnya data tentang sekolah dapat ditampilkan secara *online* dan digunakan oleh orang tua sebagai referensi untuk memilih sekolah untuk anaknya. Contoh lainnya adalah profil suatu daerah yang ditampilkan secara *online* dengan berbagai keunggulannya dan kebutuhannya dapat memberikan peluang

⁴⁹ Ibid, hlm.42

bisnis bagi masyarakat daerah lain tanpa harus mendatangi daerah yang bersangkutan.

- d. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan lebih efisien. Misalnya sosialisasi berbagai produk pemerintah kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala dilakukan secara *online*. Instruksi-instruksi bupati dapat lebih cepat dan lebih murah ketika disampaikan melalui internet ketimbang harus mengumpulkan seluruh aparat pemerintah kabupaten (terutama camat dan kepala desa); dan
- e. Bagi pemerintah, pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat. Pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efisien dan pelacakan data dan informasi dapat lebih mudah dilaksanakan.⁵⁰

1.5.7 Hambatan Dalam Mengadopsi Transformasi Digital

Salah satu cara dapat meningkatkan kualitas pelayanan Publik adalah dengan diterapkannya pelayanan Digital Sebagaimana Pada asensinya Pelayanan Publik Digital merupakan solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik yang Konvensional lambat berbelit-belit dan boros menjadi pelayanan yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang efisien, efektif, transparan, akuntabilitas dan responsif sehingga menuju pelayanan yang profesional. Namun, dalam penerapan transformasi digital pada pemerintahan daerah di Indonesia, tentu disertai kendala yang cukup beragam yang dianalisis oleh Sepriano dari sisi internal organisasi publik, antara lain:

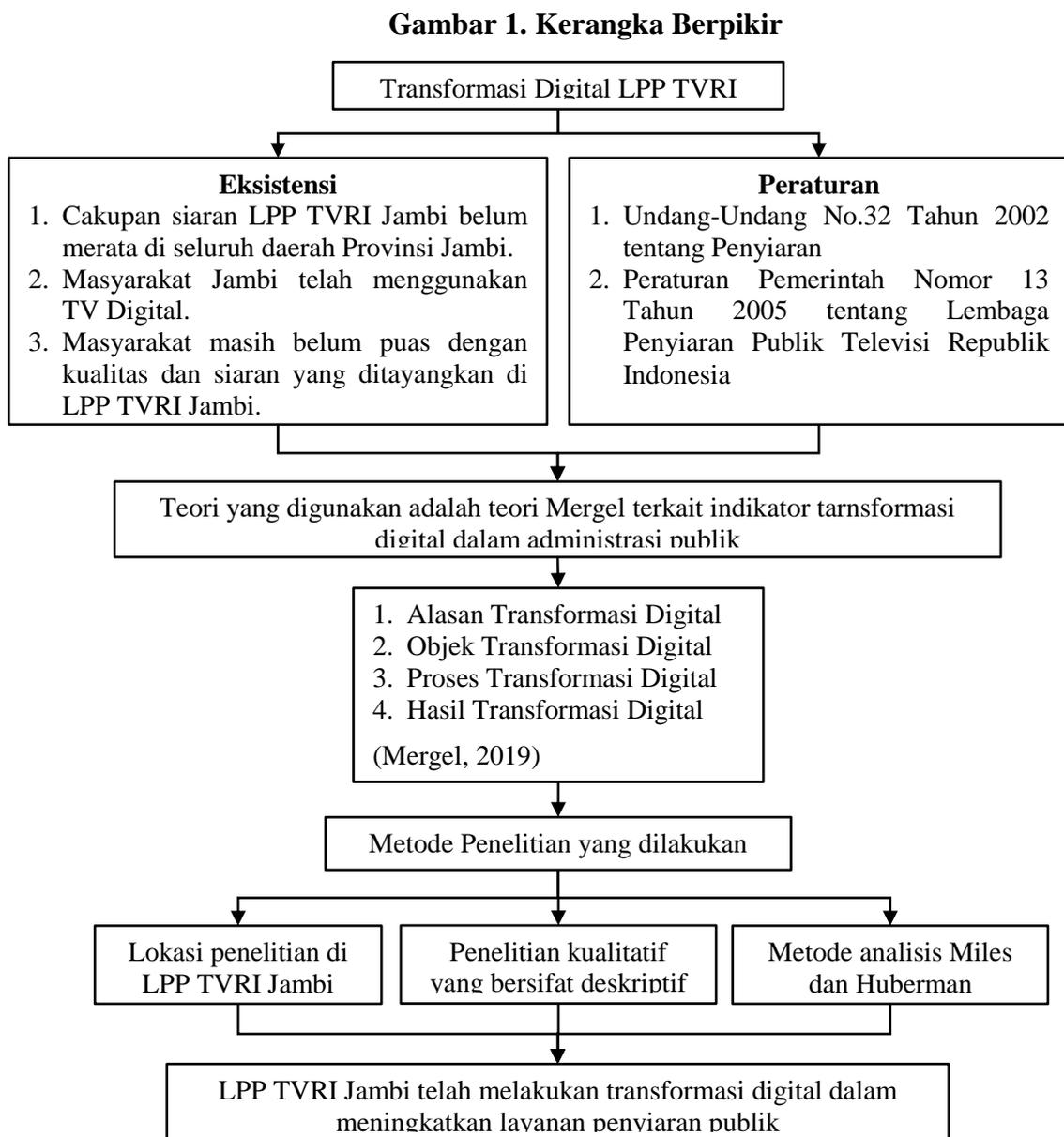
- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum mumpuni;

⁵⁰ Ibid, hlm.44-45

- b. Kurangnya anggaran/dana untuk pengelolaan teknologi;
- c. Sarana prasarana belum memadai;
- d. Infrastruktur/jaringan internet yang belum mencapai seluruh wilayah;
- e. Kurangnya insentif untuk pegawai.⁵¹

1.6 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan dalam bagan berikut:



⁵¹ Ibid, hlm.65-68

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah berjenis kualitatif deskriptif yakni berupaya memaparkan kondisi subjek dan memaparkan kondisi nyata yang ada dilapangan. Metode penelitian deksriptif termasuk kedalam golongan jenis penelitian atas dasar tingkat eksplanasi. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan akan memaparkan kondisi maupun nilai dari satu ataupun lebih variabel dengan mandiri. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan tidak memakai angka statistik, melainkan dalam bentuk pemaparan deskriptif yang berupaya menggambarkan suatu gejala, suatu kejadian, suatu kondisi yang sedang terjadi, dan dalam penelitian ini memaparkan kejadian dan peristiwa yang terjadi supaya menjadi fokus perhatian yang selanjutnya dijelaskan sesuai apa yang ada.⁵² Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui optimalisasi dan kendala yang dihadapi LPP TVRI Jambi melaksanakan transformasi digital dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di LPP TVRI Jambi yang berlokasi di JL. Kapten Hasan, Sungai Asam, Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36124, Indonesia. Nomor telepon / kontak: (0741) 62072.

1.7.3 Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dimana data penelitian berbentuk uraian penjelasan dalam bentuk kata, skema, ataupun gambar. Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm.17

mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:⁵³

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya pihak ketiga atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal dan artikel. Selain itu, juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan dokumentasi pada saat penelitian berlangsung.

1.7.4 Fokus Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti memfokuskan penelitian pada transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam hal ini dimaksudkan untuk mewadahi kepentingan publik dalam penyiaran. Boleh dikata merupakan kebijakan yang membalik arah bandul jam yang ketika masa Orde Baru publik dikontrol oleh media, kemudian dengan undangundang ini dibalik publiklah yang mengontrol kekuasaan. Karena itu, apa yang disebut radio pemerintah (*government radio*) atau televisi pemerintah (*government television*)

⁵³ Ibid, hlm.194

sudah habis riwayatnya. Boleh dibilang skema LPP merupakan wujud dari konsep sosiologinya August Comte tentang kontrol sosial (*sosial control*), yakni masyarakat mempunyai kekuatan dan cara untuk mengontrol kekuasaan sehingga berjalan pada rel yang benar (*on the track*).⁵⁴

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.⁵⁵

Adapun kedudukan LPP TVRI dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. LPP TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- b. LPP TVRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Tempat kedudukan LPP TVRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah.⁵⁶

⁵⁴ Redi Panuju. *SISTEM PENYIARAN INDONESIA: Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta: Penerbit KENCANA, 2015, hlm.217

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

⁵⁶ Ibid

Tugas LPP TVRI dalam Pasal 4 dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa LPP TVRI bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁷

Selanjutnya, fungsi LPP TVRI dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPP TVRI.⁵⁸

Pada dasarnya semua lembaga penyiaran harus berkontribusi untuk membuka akses informasi terhadap seluruh wilayah negara. Namun KPI berpendapat bahwa tugas utama harus dilakukan oleh lembaga penyiaran publik RRI dan LPP TVRI, karena sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) mengemban amanat besar merajut untaian informasi seluruh nusantara dengan anggaran negara pula. Jika secara kuantitatif seluruh wilayah dapat dijangkau akses informasinya melalui sistem penyiaran nasional, agar dapat dipikirkan bagaimana informasi yang diterima oleh warga negara Indonesia bukanlah informasi yang tidak tepat atau informasi yang tidak dibutuhkan, karena informasi yang disampaikan melalui lembaga penyiaran haruslah informasi yang benar dan layak

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

yang mampu menjaga integrasi nasional serta kemajemukan masyarakat Indonesia. Jika tidak, justeru dengan terpaan informasi yang salah akan mengganggu tatanan kebangsaan termasuk mengenai nasionalisme warga negara di wilayah perbatasan.⁵⁹

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Artinya, sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tema yang penelitian yang diangkat. Adapun informan penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan, antara lain pihak yang mengetahui terkait transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik, serta bersedia dijadikan informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah 10 informan sebagai berikut:

- a. Bapak Marjoni selaku Kepala Stasiun LPP TVRI Jambi (1 informan);
- b. Bapak Sasi Klan selaku Kepala Bidang Penunjang Program LPP TVRI Jambi (1 informan);
- c. Bapak Jefri selaku Kepala Bidang Transmisi LPP TVRI Jambi (1 informan);
- d. Bapak Kemas Alfajri selaku Kepala Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Jambi (1 informan);
- e. Masyarakat Provinsi Jambi (5 informan).
 - 1) Bapak Sudarmanto selaku Pekerja Laki-Laki berumur 48 tahun;
 - 2) Ibu Neneng selaku Pekerja Wanita berumur 36 tahun;
 - 3) Egi selaku mahasiswa berumur 21 tahun; dan
 - 4) Ibu Sukaesih selaku lanjut usia berumur 60 tahun.

⁵⁹ Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen. *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen, 2012, hlm.25

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:⁶⁰

a. Wawancara

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkakn data melalui percakapan diantara orang yang mewawancarai melalui informan diwawancarai untuk memperoleh informasinya. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja menjadi terbatas. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan terkait transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan merupakan suatu teknik penelitian yang dilaksanakan dengan terstruktur dengan observasi, termasuk dengan muatan perhatian pada suatu fenomena atau objek yang ada dengan memakai semua alat indera. Dengan demikian metode observasi ini adalah sebuah aktivitas mengamati fenomena objek secara objektif dan dilakukan secara langsung ke objeknya dan pencatatan hasil secara sistematis supaya mendapatkan gambaran yang nyata tentang keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, akan dilakukan pengamatan

⁶⁰ Ibid, hlm.105

terkait transformasi digital LPP TVRI Jambi dalam meningkatkan layanan penyiaran publik.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi diperoleh dari foto-foto dan video hasil penelitian secara langsung di lapangan, dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data yang akan dicari adalah data berupa:

- 1) Alasan transformasi digital yang dilakukan oleh LPP TVRI Jambi;
- 2) Objek transformasi digital yang dilakukan oleh LPP TVRI Jambi, seperti program, produksi dan penyebaran konten;
- 3) Proses transformasi digital yang dilakukan oleh LPP TVRI Jambi misalnya penggunaan data besar, pendekatan berbasis data, dan berpusat pada pengguna;
- 4) Hasil transformasi digital di LPP TVRI Jambi mencakup keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impacts*).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan peneliti analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menguraikan informasi-informasi berdasarkan kenyataan yang diperoleh. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis Miles dan Huberman berikut:⁶¹

⁶¹ Ibid, hlm.134-142.

a. *Data Collection*

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya sehingga akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

b. *Data Condensation*

Data Condensation atau kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan.

c. *Data Display*

Data display yaitu penyajian data berupa narasi pengungkapan secara tertulis agar alur kronologis peristiwa dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

d. *Conclusion Drawing / Verification*

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan metode validitas internal (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi data. Serangkaian aktivitas uji kredibilitas data dalam penelitian ini adalah

memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data dan menggunakan referensi yang cukup.⁶²

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Berikut pemaparan ketiga triangulasi tersebut:⁶³

- a. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
- c. Triangulasi waktu. Proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.

⁶² Ibid, hlm.121

⁶³ Ibid, hlm.130